

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Pendidikan Sebagai Instrumen Pokok Perjuangan Kebudayaan

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Syihabuddin, Ardy
Publisher	Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-06-23 19:14:24
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/161528

Pendidikan Sebagai Instrumen Pokok Perjuangan Kebudayaan

Ardy Syihabuddin, S.Pd

*Resimen Mahasiswa Mahakarta Daerah Istimewa Yogyakarta
Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada
Jl.Munggur No 81 Demangan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
ipunkardy@gmail.com /085741859269*

Sub Tema Paper ;

Pemuda, Pendidikan, dan Multikulturalisme

“Arah Pendidikan dan Sumberdaya Manusia”

Abstrak :

Soekarno menyatakan bahwa proklamasi 17 agustus 1945 hanyalah jembatan emas yang harus dilalui menuju cita-cita besar bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. Jalan untuk mencapai cita-cita tersebut adalah dengan trisakti, yakni berdaulat dalam bidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang budaya. Oleh sebab itu kebudayaan menjadi komponen yang sangat penting dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara untuk diperjuangkan.

Instrumen perjuangan kebudayaan itu sendiri memang tidaklah tunggal, namun didalamnya terdapat instrumen pokok yang menjadi dasar dan syarat kunci untuk memperkokoh kepribadian bangsa Indonesia yang memang multikultural. Bangsa yang terdiri dari banyak sekali suku, agama, golongan, kepercayaan serta adat istiadat yang berbeda-beda. Instrumen pokok tersebut ialah pendidikan, dengan pendidikan generasi bangsa bisa mengerti tentang jati diri dan kedudukannya sebagai penerus estafet perjuangan bangsa, dengan pendidikan pula kebudayaan bisa tetap eksis dan mendapatkan ruang untuk terus berkembang.

Problem timbul di era globalisasi yang sudah tidak mengenal sekat seperti saat ini. Persilangan kebudayaan antar bangsa tidak dapat dihidari dan berimbas pada kehidupan masyarakat Indonesia baik diranah sosial, politik, bahkan keagamaan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kebudayaan dari luar tersebut selaras dengan kebudayaan Indonesia? apa implikasinya? Dan apa yang harus dilakukan dalam konteks saat ini?

Disinilah pendidikan berfungsi untuk mempertahankan kepribadian bangsa sekaligus instrumen filtrasi, karena sejatinya tak semua yang dari luar akan berimbas positif bagi bangsa Indonesia. Pendidikan adalah instrumen utama bagi perjuangan kebudayaan Indonesia, tak hanya sebagai benteng pertahanan melainkan juga sebagai instrumen penyebar gagasan budaya kolektifisme dan gotong royong Indonesia ke dunia Internasional. Pendidikan sangatlah penting terutama bagi pemuda sebagai generasi penerus bangsa, seperti kata Ki Hadjar Dewantara bahwa pendidikan adalah alat untuk memperjuangkan kebudayaan.

Kata Kunci : Pendidikan, Kebudayaan.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan bagian yang penting bagi kehidupan manusia dalam menyambung rantai kehidupan. Teknologi, sejarah, kebudayaan, ilmu pengetahuan alam, matematika, bahkan semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia tidak lepas dari pendidikan. Dengan pendidikan pula ilmu dan teori-teori dapat terus tersambung dan berkembang sampai sekarang.

Dalam sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia sudah dapat teridentifikasi bahwa pendidikan tidak lepas dari kebijakan politik. Bicara soal pendidikan di Indonesia tentu tak bisa dilepaskan dari tokoh-tokohnya sebagai pejuang pendidikan. Salah satunya Ki Hadjar Dewantara, peletak dasar pendidikan di saat bangsa masih tercengkram penjajahan kolonial Belanda, ketika rakyat belum menyadari keterjajahannya akibat terlalu lama terkungkung dalam tekanan dan ketakutan yang dilakukan Belanda. Akibat kondisi obyektif semacam itu maka pendidikan pada masa itu diabdikan pada upaya mencapai kemerdekaan, dengan jalan menyadarkan rakyat Indonesia serta memberikan kemerdekaan lahir batin agar rakyat berani untuk memperjuangkan kemerdekaan. Begitu pula setelah Indonesia berhasil merdeka, beliau menjadi pelopor dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Digabungkannya antara Kementerian pendidikan dan kebudayaan Indonesia juga bukan tanpa sebab, landasan substansialnya adalah bahwa pendidikan merupakan instrumen untuk mempertahankan dan memperjuangkan kebudayaan

Indonesia. Hal ini berangkat dari keyakinan bahwa Indonesia bukanlah negara *inlander* yang harus tunduk dengan kebudayaan asing yang justru menindas, juga bukan bangsa yang *chauvinistik*, merasa kebudayaannya lebih unggul dari yang lain sehingga punya legitimasi untuk menindas bangsa lain. Indonesia mengenal konsep sosio-nasionalisme, dimana nasionalisme termasuk dalam kebudayaannya juga berwatak perikemanusiaan.

Namun fakta berkata lain, pada tahun 2015 mantan Menteri pendidikan dasar dan kebudayaan Anies Baswedan berstatemen ketika berkunjung ke Tamansiswa, sekolah yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara dan membandingkan pendidikan di Finlandia dengan Indonesia. Beliau menilai bahwa pendidikan di Indonesia masih sangat jauh dibandingkan dengan Finlandia, yang lebih mengejutkan adalah buku Ki Hadjar Dewantara menjadi buku pedoman di Finlandia sebagai Negara dengan peringkat pendidikan nomer satu di dunia. Ironisnya buku pendidikan karya Ki Hadjar Dewantara bahkan tak dibaca di Indonesia. Menjadi pertanyaan besar bahwa pendidikan di Indonesia justru tidak mencerminkan ajaran Ki Hadjar Dewantara, yang notabnya adalah tokoh pendidikan dan kebudayaan bangsa Indonesia.

Selaras dengan itu, dalam menggali pendidikan dan kebudayaan Indonesia tak bisa dilepaskan dari peranan kaum muda. Dalam sejarah Indonesia, pemuda selalu jadi pelopor dan roda penggerak perubahan bangsa. Mulai dari mometum sumpah pemuda 1928 yang menyatukan spektrum perjuangan melawan kolonialisme, hingga dalam dinamika perjalananya berhasil mendorong kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Namun, saat ini dalam konteks sosial politik berbeda, keterlibatan aktif pemuda semakin tidak nampak. Alam pikir liberalisme yang terus mengkikis generasi muda berimpikasi pada karakter yang individualistik dan apatis terhadap lingkungan kemasyarakatan.

Penelitian yang dilakukan litbang Kompas bulan oktober tahun 2015 menyatakan bahwa kecenderungan orientasi kalangan muda saat ini 69,8 % pada diri sendiri (individualistis), sedangkan hanya 27,8 % yang berorientasi dan peduli pada masyarakat, selebihnya 2,4 tidak tahu. Hasil yang lain meunjukkan kiprah pemuda dalam perjuangan politik hanya 37,9 %, pengamalan Pancasila 27,5 %, dan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa hanya 36,3 %. Hasil yang

cukup menonjol hanya ditunjukkan dalam peningkatan prestasi olahraga yaitu 53%.

Jika direfleksikan, realitas kondisi pemuda saat ini sangat menurun dibandingkan deretan sejarah besar dinamika republik. Hal semacam ini tentu tak lepas dari peran pendidikan itu sendiri. Watak individual dan kompetitif yang digembar-gemborkan berefek serius bagi kondisi generasi muda saat ini. Tujuan utama pendidikan sebagai tercapainya kemerdekaan lahir, batin, dan tenaga serta didapkannya ilmu pengetahuan sudah bergeser kedalam lembaga pembuat ijazah untuk mencari kerja belaka. Belum lagi berkaitan dengan paradigma pendidikan yang masih bercorak positivistik, yaitu melepaskan pendidikan dari ranah problematika sosial masyarakat.

A. Gotong Royong (Kolektifisme) sebagai Kebudayaan Dasar Masyarakat Indonesia yang Multikultural

Di Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke terdapat sangat banyak kelompok etnik atau suku bangsa, data BPS tahun 2010 menyebutkan terdapat 1.340 suku bangsa. Belum lagi Agama yang juga tidak homogen, memang yang mendapat pengakuan dari negara barulah enam kepercayaan, namun sejatinya masih sangat banyak aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat nusantara warisan turun temurun yang sudah eksis sejak ratusan tahun.

Dari masyarakat yang multikultural tersebut sebetulnya mengandung dua sisi perspektif yang dapat merugikan sekaligus menguatkan bangsa. Sisi kekurangannya dapat kita lihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sering terjadinya konflik antar etnis dan golongan. Konflik tersebut sebetulnya dipicu perebutan ekonomi dan ruang hidup yang merembet menjadi konflik antar golongan yang tak jarang bahkan menelan banyak korban jiwa. Di sisi yang lain multikulturalisme justru bisa dijadikan satu perekat yang kuat dalam jahitan bhineka tunggal ika. Banyaknya ragam tradisi, bahasa, serta seni budaya menjadi kekayaan tersendiri yang patut untuk terus lestari. Karena sudah teruji, bahwa heterogenitas etnis tidak berkolerasi secara linier dengan bersatunya sebuah

bangsa. Sebut saja ketegangan di Timur Tengah yang tak juga usai, yang notabeneya terdiri dari latar belakang etnis yang sama.

Filosofi dasar corak kebudayaan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari sisi historis terbentuknya suatu *nation*. Pada pidato di hadapan sidang BPUPKI, Presiden Soekarno memaparkan tentang dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang disepakati secara mutlak oleh seluruh peserta sidang dan menjadi dasar bagi berdirinya republik hingga hari ini. Pancasila tersebut menurut Soekarno bukanlah rumusnya, melainkan nilai-nilainya memang sudah terkandung di dalam masyarakat nusantara selama ratusan tahun, Soekarno hanya mengaktualisasikannya saja. Pancasila sendiri ketika diperas menjadi Tri-sila menjadi sosio-demokrasi, sosio-nasionalisme, dan ketuhanan. Dari Tri-sila tersebut jika diperas kembali menjadi Eka-sila yaitu gotong royong. Gotong royong mengandung makna kolektifisme, senasib-sepenanggungan, solidaritas serta kebersamaan, inilah karakter dasar budaya masyarakat Indonesia yang sudah tumbuh bertahun-tahun lamanya.

Selanjutnya pasca proklamasi kemerdekaan budaya kolektifisme tersebut juga dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya berkaitan dengan hak mendasar warga negara dalam UUPA, dalam pasal 5 UUPA disebutkan bahwa “ Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia ... “. Dari landasa hukum tersebut dapat ada dua klausul yang mencerminkan karakter dasar serta tujuan dari bangsa Indonesia. Pertama tentang hukum adat, karakter masyarakat Indonesia adalah kelompok-kelompok komunal yang kemudain terintegrasi menjadi satu kesatuan bangsa yang berwatak kolektif yang memiliki cita-cita bersama. Kedua yaitu sosialisme Indonesia sebagai tujuan berbangsa dan bernegara, sosialisme adalah anti tesa dari sistem ekonomi kapitalis yang berwatak individualistik.

B. Neoliberalisme, Problem Pokok Pengikis Kepribadian Budaya Indonesia

Di era abad ke XXI yang tak mengenal sekat dan batas ini, tidak mengherankan jika persinggungan satu budaya dengan yang lain semakin tak

terkendali. Corak masyarakat dan budaya yang berbeda-beda tiap bangsa saling berdialektika satu dengan yang lain. Memang banyak yang dalam perjalanannya mengalami sinergi dan dapat berjalan beriringan, namun tak jarang juga mengalami banyak penolakan dan benturan yang hebat antara satu dengan yang lain.

Pasca perang dunia ke dua, relatif tak ada lagi kolonialisme bersenjata dari negara satu ke negara lain. Namun, hal tersebut tidak berarti penjajahan berakhir begitu saja, justru ekspansi ini telah bertransformasi menjadi penjajahan gaya baru. Dari sini neoliberalisme hadir sebagai jalan eksploitasi gaya baru. Berangkat dari teori *dependency* bahwa negara-negara maju sengaja menciptakan ketergantungan di negara-negara berkembang/*periphery*. Sehingga negara-negara berkembang tak bisa maju karena selalu menjadi subordinat dan dikondisikan untuk selalu bergantung. Berbagai macam cara dilakukan untuk itu, seperti memberikan hutang lewat kendali IMF dan *world bank* dengan mewajibkan perjanjian-perjanjian yang sebenarnya memberatkan Indonesia, membuat struktur kendali ekonomi politik dan hukum untuk memperlancar misinya, sampai dengan taktik *divide et impera* yang selalu berhasil memecah belah kesatuan bangsa. Demikian halnya dengan kebudayaan, watak eksploitatif dan individualistik adalah ciri khas ekspansi neoliberal yang sebetulnya bertentangan dengan karakter dasar rakyat, namun terus dipaksakan di Indonesia.

Menurut Ki Hadjar Dewantara yang dimaksud “kultur” atau kebudayaan adalah buah dari keadaban manusia, oleh karena adab itu sifatnya kelahiran budi, maka buah-buah dari kelahiran budi itu lalu dinamakan budaya. Perkataan “kultur” itu sendiri berasal dari bahasa latin (*colere, cultivere*) yang berarti mengusahakan, yakni mengusahakan untuk mendapat kemajuan hidup. Ki Hadjar Dewantara menempatkan pendidikan sebagai salah satu unsur yang tidak bisa dilepaskan dan melekat dari keseluruhan kehidupan masyarakat. Termasuk hubungannya dengan kebudayaan, ekonomi, politik dan problematika kehidupan sosial lainnya.

Selaras dengan itu, kebudayaan erat kaitanya dengan antropologi. Di dalam esainya, *The Marxian of Rosa Luxemburg*, George Lukas (1990:27) menyatakan bahwa perbedaan mendasar antara pemikiran Marx dan pemikiran borjuis bukan terletak pada pengutamakan aspek ekonomi dalam menjalankan

masyarakat dan sejarahnya, tapi sudut pandang totalitasnya. Totalitas atau sudut pandang yang mengutamakan kesalingkaitan antar unsur, antar aspek, dan antar waktu dalam satu kesatuan kehidupan sosial yang senantiasa berubah secara dialektis merupakan metode utama dari Marx.

Dari titik inilah kiranya antropologi bisa meraih kembali hakikatnya sebagai ilmu tentang umat manusia setelah sekian lama dikungkung dogma sebagai ilmu fungsionalisme yang melepaskan kacamata historis dari antropologi. Mengikuti kritik Marx terhadap ahli-ahli ekonomi borjuis, dalam kasus fungsionalisme, para ahli teori ini begitu canggih menjelaskan berbagai pola kehidupan masyarakat, tetapi mereka tidak menjelaskan hubungan-hubungan sosial ini tercipta, fungsionalisme tidak bicara bagaimana 'pergerakan historis' melahirkan hubungan-hubungan sosial ini. Padahal lewat penelusuran asal-usul hubungan sosial inilah bisa ditemukan sumber-sumber asli cacat-cacat relasi masyarakat terutama praktek penghisapan manusia atas manusia.

Ekspansi Kebudayaan

Ada polemik dan pertanyaan besar dalam dunia filsafat dan kebudayaan berkaitan dengan lokalitas. Apa sebenarnya lokalitas dan apa itu dominasi menjadi diskursus yang mewarnai perdebatan. Banyak pemikir post moderen yang berpandangan bahwa semua kebudayaan berasal dari entitas lokal, kebudayaan yang berhasil berekspansi keluarlah yang mampu mendeterminasi dan mempengaruhi budaya yang lain sehingga menjadi budaya hegemonik.

Dalam konteks Indonesia budaya gotong royong yang menjadi karakter dasar masyarakat diekspansi oleh kebudayaan yang individual dan eksploitatif dari luar. Budaya individual ini merambah sampai ke ruang-ruang terdalam dari masyarakat Indonesia, terlebih mengikis generasi muda yang sedang dalam tahapan pembentukan karakter. Tak mengherankan jika saat ini kecenderungan kaum muda dalam aspek sosial politik semakin melemah. Karena sejatinya, individualisme ini yang menjadi akar dari tumbuh kembangnya sikap apatis dan hedonis generasi muda serta ketidak pekaanya terhadap lingkungan sosial.

Ekspansi kebudayaan ini tentu tidak berjalan secara sporadis, namun linier dengan ekspansi ekonomi dan politik, terlebih selaras dengan kepentingan *Multi*

National Company dan *Trans Nasional Company* yang membutuhkan pasokan sumber daya alam dari Indonesia serta pasar yang luas, seiring dengan budaya konsumeristik yang selalu terjaga.

Slavoj Zizek salah satu pemikir kontemporer menyatakan bahwa kapitalisme global dalam melakukan eksploitasi saat ini merubah bentuknya dengan wajah yang sangat humanis, sangat toleran sehingga memanipulasi kesadaran. Di titik ini pendidikan berperan sangat penting sebagai aparatus ideologis sekaligus pelanggeng hegemoni individual eksploitatif bagi kaum kapitalis.

Lebih lanjut Revrison Baswir, ekonom UGM sekaligus pakar ekonomi kerakyatan menyebutkan bahwa penyebaran budaya luar di Indonesia dimulai sejak adanya intelektual-intelektual Indonesia yang disekolakan di luar khususnya Amerika dan kembali ke Indonesia yang kemudian disebut mafia *Berkeley*. Intelektual tersebut menjadi corong kepentingan asing dan mendidik generasi muda Indonesai. Segaris dengan itu, dalam aspek kebudayaan Dede Mulyanto (2011:222) dalam buku *Antropologi Marx* menjelaskan;

“ Di Indonesia sendiri , jurusan antropologi tumbuh berkembang di masa ‘pembangunan’. Sejak kepulangan Pofesor Koentjaraningrat dari Yale University, antropologi dikombangkan khusus untuk mengabdikan pada perjuangan pembangunan yang berpangkalan di suatu univeritas ternama di Jakarta dalam memoderenkan bangsa Indonesia agar bisa tinggal landas menuju masyarakat adil dan makmur. Seperti bulldozer, antropologi Indonesai bergerak ke berbagai pedalaman membukakan jalur yang akan melapangkan gerak pembangunan ke mana pun kapital ingin mengalir.”

C. Pendidikan sebagai Filtrasi dan Penyangga Kebudayaan Indonesia

Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter, pikiran (*intellect*) dan tubuh anak (Ki Hadjar Dewantara, 2011: 14). Dalam mendidik anak bagian-bagian itu tidak boleh dipisah-pisahkan supaya pendidik dapat memajukan kesempurnaan hidup anak didiknya yaitu kehidupan anak-anak didik yang selaras dengan dunianya. Di samping itu melalui metode among yang mengandung pengertian bahwa para guru adalah pemimpin murid dalam proses belajar mengajar, tidak otoriter tetapi

demokratis dialogis. Driyarkara dengan mengolah Serat Wedatama mengatakan bahwa orang muda harus mulad laku utama (mengikuti tingkah laku yang baik), karena mendidik adalah memanusiaikan manusia muda. Anita Lie mengatakan sebaiknya pendidikan menggunakan metode pembelajaran, peneladanan, pembiasaan pembudayaan dan perubahan (Saksono, 2008: 47-82).

Tamansiswa, perguruan yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantaa sebagai suatu sekolah nasional berdasarkan kebudayaan sendiri, bukan hanya mendidik intelektual yang menjadi pengajaran melainkan mendidik manusia pribadi yang insaf akan dirinya sebagai anggota masyarakat (Hatta, 1948: 23). Pernyataan Moh Hatta ini berarti merupakan sikap penentangan Ki Hadjar Dewantara terhadap sistem pendidikan barat yang semata-mata mementingkan intelektualisme dengan mengesampingkan nilai-nilai moral maupun nilai-nilai budaya lokal. Walaupun Ki Hadjar Dewantara tidak anti budaya asing, tetapi nilai suatu budaya harus berakar dari budaya sendiri sedangkan nilai budaya asing harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya sendiri.

Pengajaran dan pendidikan adalah sarana penyebarluasan benih hidup merdeka di kalangan rakyat. Perjuangan dan pengabdian Tamansiswa kepada rakyat Indonesia selama dalam kekuasaan penjajahan (1922-1945) selalu sejalan dengan pergerakan rakyat dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia.

Ali Saifulah H.A dalam bukunya yang berjudul Antara Filsafat dan Pendidikan, mengemukakan bahwa teori pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara memang menunjukan adanya sesuatu yang dianggap penting dalam kaitannya dengan pembahasan hubungan antara filsafat dan teori pendidikan, sebagai salah satu contoh yakni definisi pendidikan nasional dari Ki Hadjar Dewantara.

“Ki Hadjar Dewantara (2011: 15) pendidikan Nasional ialah pendidikan yang berdasarkan garis-garis hidup bangsanya (kultur nasional) dan ditunjukkan untuk keperluan peri kehidupan, yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya, sehingga bersamaan kedudukan dan pantas bekerjasama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia disuruh dunia”.

Definisi pendidikan nasional tersebut telah disesuaikan dengan dasar-dasar filsafat pendidikan nasional dan yang dijadikan asas dasar pendidikan dalam perguruan Tamansiswa yang dibentuknya. Buah pemikirannya tentang tujuan pendidikan yaitu memajukan bangsa secara keseluruhan yang di dalamnya banyak terdapat perbedaan-perbedaan dan dalam pelaksanaan pendidikan tersebut tidak boleh membeda-bedakan agama, ras, elit, suku, budaya, adat, kebiasaan, status ekonom, status sosial, dan sebagainya, serta harus di dasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan yang asasi (Sugihartono dkk, 2007: 125).

Ajaran Ki Hadjar Dewantara dalam bidang pendidikan sangatlah luas, jika digolongkan terdapat delapan bab substansi pokok pendidikan yaitu; pendidikan Nasional, politik pendidikan, pendidikan kanak-kanak, pendidikan kesenian, pendidikan keluarga, ilmu jiwa, ilmu adab dan bahasa. Jika dilihat menggunakan sistem Trisentra, pendidikan menurut (Ki Hadjar Dewantara, 2011: 70) dibagi menjadi tiga yaitu; keluarga, perguruan/sekolah, dan pergerakan pemuda. Lebih lanjut Ki Hadjar Dewantara menitik beratkan pada asas kemerdekaan dalam mendidik generasi bangsa;

“Berilah kemerdekaan dan kebebasan kepada anak-anak kita, bukan kemerdekaan yang leluasa, namun yang terbatas oleh tuntutan kodrat-kodrat alam yang khas atau nyata, dan menuju ke arah Kebudayaan, yakni keluhuran dan kehalusan hidup manusia. Agar kebudayaan tadi dapat menyelamatkan dan membahagiakan hidup dan penghidupan diri dan masyarakat maka perlulah dipakainya dasar kebangsaan, akan tetapi jangan sekali-kali dasar ini melanggar atau bertentangan dengan dasar yang lebih luas, yaitu dasar kemanusiaan.” (Sumber: Ki Hilmi Yusuf dalam buku “Ki Hadjar Dewantara dalam Pandangan Para Cantrik dan Mantrinya”, 1989: 57).

Mengembalikan Kepribadian Budaya Bangsa

Dari beberapa hal substansial diatas serta berbagai masalah yang melingkupi bangsa ini, terlebih dalam aspek kebudayaan tentu diperlukan adanya satu proteksi, sehingga kebudayaan yang masih tersisa ini tak ikut tergerus dan akhirnya hilang. Titik tekanya tentu pada generasi muda yang akan melanjutkan estafet perjuangan kedepan. Lalu dari mana semua ini akan dimulai? Jawabanya adalah dari pendidikan. Berangkan dari terori Tri-Pusat pendidikan bahwa

terdapat tiga tempat pendidikan yang sangat penting yaitu sekolah, keluarga dan pendidikan pemuda.

Dari ketiga tempat tersebut yang sama sekali tidak bisa dilewatkan adalah pendidikan karakter, lebih spesifik karakter gotong royong. Melihat pendidikan hari ini yang secara garis besar sudah menjadi pusat pengkaderan watak liberal individualistik perlu adanya pendidikan alternatif sebagai kontra hegemoni. Diranah sekolah semisal, sudah banyak bermunculan sekolah alam sebagai anti tesa dari sekolah di tingkatan dasar yang cenderung malah membebani siswa dengan tugas yang sangat berat.

Di level pendidikan tinggi perlu adanya konsolidasi yang massif baik bagi mahasiswa ataupun dosen. Sebagai anti tesa dari gempuraan ekspansi kebudayaan individualistik yang semakin menjalar. Selain itu filtrasi juga wajib dilakukan di ranah teori-teori yang tak berkesesuaian dengan karakter kolektifisme bangsa Indonesia. Watak atomistik dari ilmu harus diurai, karena dengan cara pandang semacam ini akan berimbas pada pengkotak-kotakan ilmu pengetahuan dan melihat suatu permasalahan tidak holistik, hingga berimbas semakin jauh dari permasalahan sosial masyarakat. Bukan berarti kita harus menutup diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, namun sikap kritis harus terus dijaga agar tidak terbawa arus leberalisme.

Substansi yang sama dilontarkan oleh Karl Marx. Bagi Marx, berteori itu politis. Praxis merupakan roh pemikirannya. Seperti halnya Marx mengguakan ekonomi-politik borjuis untuk menyusun kritik terhadap kapitalisme, begitu pula kita bisa menjadikan antropologi sebagai senjata kritik terhadap tatanan sosio-kultural kapitalisme dan kritik diri atas kecenderungan ilmu sosial yang ikut melanggengkan tatanan tersebut.

Di sisi lain pendidikan juga harus menjadi penyangga bagi kebudayaan Indonesia. Degradari moral yang terus mengikis generasi muda saat ini dan melemahnya kebudayaan nasional mesti harus segera dihentikan. Pendidikan berfungsi sebagai penyangga agar kebudayaan tetap eksis dan terus mereprodksi dirinya sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

Merasa bangsa sendiri lemah dengan sikap *inlander* adalah kesalahan besar, cara pandang untuk meniru resep-resep bangsa asing dengan konsep yang

secara paksa diterapkan di Indonesia harus ditinggalkan. Karena sudah teruji, resep-resep tersebut bukanya malah memperbaiki kehidupan sosial namun justru membuat Indonesia makin tergantung dan tidak berdaulat. Kepribadian sebagai satu kesatuan bangsa yang besar terombang-ambing. Sudah saatnya pendidikan berjalan sebagaimana mestinya sebagai satu sarana dan instrumen pokok untuk mengembalikan lagi kepribadian budaya Indonesia.

Daftar Pustaka

- David Harvey. 2009. *“Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis”*
Yogyakarta: Resist Book
- Ki Hadjar Dewantara. 2011. *Kebudayaan*. Yogyakarta: Yayasan Persatuan Tamansiswa.
- _____. 2011. *Pendidikan*. Yogyakarta: Yayasan Persatuan Tamansiswa.
- Ki B. Boentarsono, dkk. 2012. *Tamansiswa, Badan Perjuangan Kebudayaan & Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Perguruan Tamansiswa Yogyakarta.
- Ki Suwarjono Woro Sujono. 2015. *Pendidikan dan Pengajaran Nasional, Ki Hadjar Dewantara*. Yogyakarta: Multi Presindo.
- Mansour Fakhri, Rahardjo, Roem Topatimasang, Toto,. 2007. *Pendidikan Populer*. Sleman: INSISTPress.
- Moleong, L.J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Ngalim Purwanto. 1984. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Remaja Karya.
- Newman Michael (2006): *“Sosialisme Abad 21”*. Yogyakarta: Resist Book
- Nurani Soyomukti. 2015. *Teori-Teori Pendidikan: Dari Tradisional, (Neo)Liberal, Marxis-Sosialis, Hingga Postmoderen*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Paulo Freire. 1985. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 2007. *Politik Pendidikan*. Yogyakarta: REaD & Pustaka Pelajar.

Soekarno. 2005. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Yayasan Bung Karno.

Sri-Edi Swasono & Sudartomo Macaryus. 2013. *Kebudayaan Mendesain Masa Depan*. Yogyakarta: UST-Press.

_____. 2015. *Pendidikan dan Kebudayaan: Ketamansiswaan, Pancasila, Keindonesiaan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.

Toto Raharjo, dkk. 2007. *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta: Isisit Pers.